

BAB II

DINAMIKA KONFLIK SUDAN DAN SUDAN SELATAN

A. Konflik Sudan dan Sudan Selatan

Pada bab ini menjelaskan tentang keadaan Sudan, konflik pemberontakan beberapa etnis setelah kemerdekaan republik Sudan pada tahun 1956 dan masih dianggap sebagai pemberontakan kecil dan mengakibatkan pemberontakan militer yang dilakukan oleh pasukan penggerak pembebasan Sudan karena tidak setujunya dengan kebijakan yang diambil oleh pemerintah pusat. Pemberontakan dari pergerakan ini memunculkan pergerakan yang lebih meluas karena mereka menginginkan Sudan Selatan keluar dari pemerintahan Sudan dan menjadi negara merdeka. Hal ini dikarenakan Pemerintah Pusat mengumumkan Sudan sebagai negara Islam sedangkan Sudan Selatan mayoritas penduduknya beragama Kristen dan etnis.

Pada bab ini juga menjelaskan tentang perselisihan Pemerintah Sudan dan Sudan Selatan dalam konflik perebutan wilayah. Ditahun 2003, Pemerintah Sudan dan Sudan Selatan merebutkan wilayah Darfur hingga akhirnya terjadinya saling serang tentara kedua Negara tersebut. Hingga menjadi perhatian lembaga internasional yang prihatin atas kejadian tersebut banyak masyarakat sipil yang menjadi korban, banyak perempuan yang mendapatkan kekerasan seksual, dan anak – anak dipaksa untuk menjadi tentara dilatih untuk membunuh musuh dengan senjata. Ditahun 2011, Pemerintah Sudan dan Sudan Selatan kembali terjadinya konflik perebutan wilayah Abyei yang berada di perbatasan antara kedua negara tersebut. Maka hal ini PBB sebagai organisasi internasional mengirimkan misi perdamaian untuk menyelesaikan konflik wilayah Abyei tersebut.

1. Sejarah Berdirinya Negara Republic of the Sudan

Republic of the Sudan merupakan Negara yang terletak di bagian timur laut Afrika diantara 4 dan 23° LU serta 22 dan 38 BT. Luas wilayah Sudan sekitar 1 juta mil persegi yang berbatasan dengan Afrika Tengah dan Chad dibagian Barat, Libya dan Mesir dibagian Utara, Ethiopia dan Eritrea dibagian Timur, serta Kenya, Uganda dan Kongo dibagian Selatan. Sudan mendeklarasikan kemerdekaannya pada tanggal 1 Januari 1956 dari Inggris, penduduk Sudan berjumlah 33 juta jiwa yang terdiri dari bermacam-macam etnis diantaranya etnis Afrika yang berkulit hitam 54%, Arab 40% dan lain-lain 6%. Agama yang terdapat di Sudan ialah Islam Sunni 75%, Animis 20%, dan Kristen 5%. Sudan memiliki kota-kota yang utama diantaranya Khartoum, Omdurman, Port Sudan, Wad Medani, Atbara, dan Juba.¹

Penduduk Sudan hidup secara berpencar – pencar, terdapat suku yang sering berkelana sebesar 10% dan suku yang menetap terutama di kota besar 25%. Pekerjaan penduduk mayoritas dalam bidang pertanian dan peternakan. Berdasarkan agama dan etnis penduduk Sudan terbagi dalam dua wilayah yaitu Sudan utara dan Sudan selatan. Sudan utara mayoritas beragama Islam keturunan Arab sedangkan Sudan Selatan masyarakatnya beragama Kristen dan animisme keturunan Afrika. Penduduk yang berada di masing – masing wilayah memiliki kehidupan terpisah karena perbedaan diantara mereka baik dalam segi agama, bahasa, gaya hidup, kebudayaan, dan lain-lain.²

Pada Abad 9 Sudan dikuasai oleh Ottoman Turki yang memberi wewenang pada Mesir untuk memerintah Sudan, karena pada saat itu Mesir dikuasai juga oleh Ottoman Turki. Kemudian pada tahun 1896, Inggris bersama Mesir menaklukan Sudan dan membangun pemerintahan berdasarkan atas perjanjian antara Inggris dan Mesir pada bulan

¹ CIA fact book: Sudan Country Profile.

<http://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/su.html>. Diakses tanggal 18 Februari 2016

² Hadi, Abdul Adnan. dalam Jurnal *Penyelesaian Masalah Sudan Selatan dan Krisis di Darfur*. Jakarta. 6 Mei 2006

Januari 1899. Perjanjian tersebut menunjukkan pemerintahan bersama kedua Negara yaitu Kondominium Anglo-Egyptian terhadap Sudan. Pemerintahan ini menitik beratkan terhadap posisi Inggris yang berhasil merebut Sudan dan memberikan kekuasaan secara de facto kepada Mesir untuk memegang kekuasaan bayangan.

Pada saat masa kolonial Inggris di Sudan, Inggris mendirikan pemerintahan kolonial yang dipimpin oleh Gubernur Jendral yang memiliki kekuasaan eksekutif dan legislatif. Pemerintah Inggris mengeluarkan Undang Undang di tahun 1922 yang memutuskan wilayah Sudan Selatan sebagai wilayah diisolir dan terpisah. Inggris membentengi Sudan Utara dengan nilai – nilai Islam Arab, mendorong terciptanya modernisasi serta meletakkan dasar – dasar pendidikan yang membentuk suatu kelompok elit terpelajar di Sudan.

Wilayah Sudan Selatan, Inggris menerapkan wilayah yang tertutup dengan melarang penduduk Sudan utara berpergian di Sudan Selatan dan menjalankan bisnis, penyebaran dan pendidikan atas agama Islam, serta di batasi untuk interaksi. Hal ini bertujuan Inggris membentuk tentara local dari penduduk Sudan Selatan dibawah komando dari Inggris yang menciptakan isolasi riil antara Utara dan Selatan.

Mesir mulai melakukan perlawanan terhadap kolonial Inggris dengan membangkitkan rasa nasionalis kepada masyarakat Sudan karena Mesir merasa bahwa Sudan masih satu jalur dengan sungai Nil sehingga kekuasaan pemerintahannya masih dibawah Mesir. Mesir menyatakan bahwa Sudan bisa menentukan nasib mereka sendiri dan membuat keputusan atas pemerintahan negara mereka sendiri. Mesir meyakinkan bahwa Inggris bisa keluar dari Sudan, propaganda ini bertujuan Mesir ingin membuat Sudan bergabung dalam pemerintahan Mesir. Akhirnya pada tanggal 12 Januari 1953, Inggris dan Mesir menandatangani perjanjian

untuk memberikan Sudan waktu untuk memutuskan untuk merdeka atau bergabung dengan Mesir.³

Pada masa transisi Sudan mengadakan pemilihan umum dan Ismail Al Azhari sebagai pemenangnya dan menjadi Perdana Menteri pertama di Sudan. Awalnya Ismail Al – Azhari ingin bergabung dengan Mesir, akan tetapi akhirnya memutuskan untuk merdeka dan menjadi Negara sendiri. Pada tanggal 1 Januari 1956 Sudan memperoleh kemerdekaannya dari Inggris.

2. Sudan Pada Masa Sebelum Pemerintahan Presiden Omar Al Bashir

Sudan sebelum dipimpin oleh Presiden Bashir situasi ekonomi dan politik mereka sangat mengkhawatirkan. Sebagai negara yang baru merdeka, situasi perekonomian Sudan dapat dikatakan sangat tidak baik dimana pada saat itu Sudan dikenal sebagai negara yang sangat miskin atau the least developed country yang memiliki struktur sosial ekonomi yang terbelakang. Keadaan politik yang mengalami gejolak dengan selalu di kudetanya pemimpin Sudan oleh militer semakin memperburuk keadaan. Situasi tersebut membuat pemerintah tidak dapat melaksanakan pembangunan dengan baik

a. Kondisi Ekonomi Sudan

Sebagai negara baru Sudan di kenal sebagai negara miskin di dunia. Sektor pertanian menjadi pilar yang penting bagi perekonomian nasional Sudan dikarenakan lahan yang luas dari pertanian mempunyai potensi yang dapat digunakan secara sistem irigasi (irrigated agricultural system) dan pertanian tadah hujan (rain-fed). Pertanian dan peternakan memberikan kontribusinya sebesar 40% dari pendapatan domestik bruto (PDB) tahunan dan mempekerjakan para tenaga kerja sebesar 50%. Peningkatan kinerja dari pertanian

³ Hadi, Abdul Adnan. dalam Jurnal *Penyelesaian Masalah Sudan Selatan dan Krisis di Darfur*. Jakarta. 6 Mei 2006

diupayakan oleh pemerintah dengan melakukan restrukturasi manajemen Gezira Scheme yang terdapat di Wad Medani dan melakukan diversifikasi dari jenis-jenis tanaman seperti kapas dan tanaman tebu untuk di ekspor ke negara lain⁴.

Masih kurangnya bantuan keuangan yang diberikan oleh pemerintah berupa penyediaan kredit untuk pertanian dan peternakan tidak menjadi halangan, Sudan terus berupaya agar dapat memanfaatkan pendapatan negara melalui perminyakan supaya pertanian dan peternakan mendapat dukungan dan bantuan. Pendanaan pemerintah dalam meningkatkan pertanian dan peternakan mereka mendapat bantuan dari UNDP yang memberikan micro financing bagi perbaikan sarana irigasi. OPEC Development Fund untuk memperluas lahan perkebunan terutama lahan tebu dan International Fund for Agricultural Development (IFAD).

Perbaikan-perbaikan terhadap berbagai sektor-sektor yang dimiliki oleh Sudan terus dilakukan untuk meningkatkan pembangunan nasional, pemerintah melakukan berbagai kerjasama dengan negara-negara lain baik dari Afrika, Asia, maupun Eropa. Kerjasama yang menjadi prioritas utama bagi pemerintah Sudan ialah hubungan kerjasama ekonomi dengan negara-negara Arab khususnya negara Teluk seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar, Bahrain dan Kuwait. Negara-negara tersebut memberikan dukungan dan bantuan pinjaman modal kepada pemerintah Sudan yang dialokasikan ke berbagai macam pembangunan dalam bidang perminyakan, industri, pertanian serta perternakan dan sektor lainnya.

b. Kondisi Politik Sudan

Pemerintahan Sudan setelah memperoleh kemerdekaan dari Inggris diwarnai dengan silih bergantinya pemerintahan baik yang dipilih melalui pemilihan umum maupun pemerintahan yang dilengserkan oleh militer secara kudeta. Pemerintahan dimulai dengan

⁴ CIA fact book: Sudan Country Profile.

<http://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/su.html>. Diakses tanggal 18 Februari 2016

pemerintahan sipil yang berada dibawah kepemimpinan Perdana Menteri Ismail AL Azhari, yang memenangkan pemilihan umum sebelum kemerdekaan. Al Azhari menjadi Presiden Sudan pada tahun 1965 dan pemerintahannya dilengserkan oleh Jenderal Ibrahim Abboud yang melakukan kudeta. Jenderal Abboud lalu memberikan kekuasaan kepada pemerintahan transisi yang dipimpin oleh Al Khatim AL Khalifa. Tidak lama berselang kekuasaan jatuh ketangan pemerintahan koalisi antara Umma Party dengan National Unionist Party. Pemerintahan tersebut tidak berlangsung lama karena kembali adanya kudeta yang dilakukan oleh Jenderal Ja'far Numeiri pada tanggal 25 Mei 1969. Kepemimpinan Jenderal Numeiri bernasib sama dengan pemerintahan yang sebelumnya karena ia di kudeta oleh Jenderal Al Dahab pada tahun 1985 dan memimpin Sudan selama satu tahun. Kekuasaan akhirnya diserahkan oleh Jenderal Al Dahab kepada pemerintahan koalisi yang telah memenangkan pemilihan umum yaitu Umma Party dengan Democratic Unionist Party yang dipimpin oleh Sadiq Al Mahdi dan Ahmed Mirghani.

3. Sudan Pada Masa Pemerintahan Presiden Omar Al Bashir

Hassan Omar Al Bashir lahir pada tanggal 1 Januari 1944 di sebuah desa yang bernama Hosh Bannaga 100 km Timur Laut dari ibukota, ia berasal dari keluarga petani. Pada saat muda Bashir masuk menjadi anggota militer Sudan dan belajar di akademi militer di Kairo, Mesir. Selama di akademi militer Al Bashir belajar dengan cepat menjadi seorang tentara dan di tahun 1973 dan ikut berperang dengan militer Mesir saat terjadinya Perang Mesir-Israel. Bashir menjadi presiden setelah melakukan kudeta militer terhadap pemerintahan koalisi saat itu.⁵

a. Perekonomian di Masa Bashir

⁵ CIA fact book: Sudan Country profile. <http://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/su.html>. Diakses tanggal 18 Februari 2016

Kondisi ekonomi yang buruk membuat Presiden Bashir pada tahun 1989, membentuk Economic Committee (EC) yang ditugaskan untuk menyusun rencana-rencana terkait pemulihan ekonomi serta menjadi penasehat ekonomi pemerintah dalam Dewan Komando Revolusi. Komite ini menyusun National Economic Salvation Program (Program Penyelamatan Ekonomi Nasional) untuk jangka periode 1990-1993. Program dibentuk bertujuan untuk swasembada pangan, pengawasan terhadap anggaran dengan lebih ketat, pengawasan defisit negara serta swastanisasi dan liberalisasi perdagangan. Bashir juga melakukan kebijakan dimana bank-bank dan asuransi-asuransi yang ada di Sudan harus menggunakan sistem Islam, tidak terkecuali bank-bank asing. Hal tersebut dilakukan untuk menghilangkan adanya bunga, perpajakan pun dihilangkan dan diganti dengan Zakat. Pengumpulan dari pembayaran Zakat tersebut oleh pemerintah dibentuk Dewan Zakat. Khusus untuk masyarakat non-Muslim diharuskan membayar Jizyah.

Pada masa pemerintahan Presiden Bashir di tahun 1999-2000 perekonomian Sudan mengalami pertumbuhan ekonomi rata-rata yang mencapai 5% per tahun, adanya penurunan tingkat inflasi sekitar 14 %, terciptanya kestabilan ekonomi makro termasuk di dalamnya kestabilan nilai mata uang Dinar. Anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) tahun 2000 meningkat mencapai 35%, perbaikan berbagai infrastruktur ekonomi dan pelaksanaan kesinambungan pembangunan nasional di berbagai bidang.

Program penyelamatan nasional diutamakan kepada pembangunan infrastruktur di berbagai bidang seperti energi, irigasi, telekomunikasi dan perhubungan yang biayanya berasal dari pengeluaran-pengeluaran yang tidak produktif. Liberalisasi ekonomi juga diupayakan oleh pemerintah dengan mengurangi kontrol terhadap sektor swasta dan disaat yang sama pemerintah secara terus menerus melakukan program privatisasi terhadap sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN), serta mendorong peran dari swasta secara lebih luas di dalam proses pembangunan nasional.

Program swastanisasi BUMN selain untuk mengurangi beban subsidi juga untuk mendapatkan dana untuk pembangunan bagi sektor industri yang tidak produktif dikarenakan buruknya fasilitas produksi, suku cadang mesin yang kurang, suplay energi yang lemah serta manajemen yang kurang professional. Program tersebut juga mencakup sektor yang vital seperti pengelolaan pusat-pusat energi, industri sandang dan makanan. Perlahan-lahan peranan dan sumbangan dari sektor jasa, energi dan pertambangan juga menjadi penting dan memberikan pengaruh yang besar bagi GDP.

Perkembangan tersebut dikarenakan ekspor minyak dan produksi emas Sudan yang meningkat. Sudan berhasil menjadi negara produsen dan pengekspor minyak bumi, ekspor pertama Sudan dimulai pada tanggal 30 Agustus 1999.

Produksi minyak Sudan semula sekitar 150.000 barel per hari tetapi pada tahun 2000 produksinya meningkat menjadi 180.000 barel per hari. Pendapatan yang diperoleh dari sektor minyak telah memberikan sumbangan bagi anggaran pendapatan Sudan tahun 2000 sekitar 21%. Kegiatan eksplorasi minyak mentah tersebut dilakukan oleh beberapa konsorsium perminyakan dari negara-negara luar yang tergabung dalam Greater Nile Petroleum Operating Company (GNPOC). Pengembangan terhadap industri perminyakan dimungkinkan dapat menarik para investor lebih banyak lagi dengan penawaran berupa atau wilayah-wilayah yang memiliki potensi tambang minyak. Hal tersebut berdasarkan atas perkiraan cadangan minyak yang dimiliki oleh Sudan yang mencapai 1,2 milyar barel. Dibangun pula fasilitas-fasilitas industri perminyakan seperti konstruksi pembuatan jalur-jalur pipa yang menghubungkan lokasi penambangan minyak di beberapa wilayah.

Meningkatnya produksi minyak Sudan yang mana ekspor minyak Sudan dapat membebaskan mereka dari pengeluaran negara untuk mengimpor minyak yang sebelumnya mencapai 13% dari total belanja dan juga mewujudkan swasembada minyak. Pemerintah

terus melakukan upaya untuk mendatangkan para investor agar menanamkan investasi mereka di Sudan, salah satu caranya dengan mengesahkan perubahan Undang-Undang dalam bidang investasi yaitu Investment Encouragement Act of 1999 yang memberikan jaminan aspek hukum untuk para investor dan fasilitas-fasilitasnya. Investor tersebut di dorong untuk memasukan investasi-investasinya di sektor ekonomi seperti pengadaan energy listrik, sektor industri, telekomunikasi, transportasi serta pertambangan dan irigasi pertanian. Neraca perdagangan luar negeri Sudan masih berada dalam posisi defisit, pada tahun 1999 nilai ekspor Sudan sekitar 780 juta dollar dan impor mencapai 1,4 miliar dollar Amerika Serikat.

b. Perpolitikan di Masa Bashir

Selama pemerintahan koalisi konflik-konflik yang terjadi di Sudan terus muncul baik konflik politik maupun pemberontakan-pemberontakan yang dilakukan oleh rakyat Sudan Selatan. Di awal pemerintahannya Presiden Bashir membubarkan partai-partai politik yang ada di Sudan serta membentuk Partai Kongres Nasional (PKN) sebagai tempat bagi seluruh rakyat menyatakan aspirasi mereka. Kekuasaan pemerintahan berada di bawah Dewan Komando Rakyat (DKR) yang dipimpin oleh Presiden Bashir, yang mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan keputusan legislatif dan eksekutif, menetapkan perubahan, pengangkatan dan pemberhentian para pejabat-pejabat negara. Dewan Komando Rakyat dibubarkan dan diganti oleh Bashir dengan parlemen sementara. Pada tahun 1996, Sudan menyelenggarakan pemilihan umum untuk memilih anggota parlemen serta presiden. Partai Kongres Nasional pimpinan Presiden Bashir meraih kemenangan yang menjadikan Presiden Bashir menjadi presiden untuk pertama kalinya periode 1996-2001.

Presiden Bashir membuat dan mengesahkan Konstitusi Sudan pada tanggal 10 Juni 1998, Konstitusi tersebut dikenal dengan Konstitusi 1998 yang telah mendapatkan persetujuan dari parlemen dan rakyat Sudan dengan cara referendum. Terciptanya Konstitusi

yang baru bagi Sudan merupakan hal yang luar biasa bagi Presiden Bashir dikarenakan pada saat pemerintahan yang sebelumnya pembuatan Konstitusi Sudan selalu gagal dikarenakan konflik politik. Pada bulan Mei 1998, Sudan membentuk Konstitusi yang mana Konstitusi tersebut terdiri dari 9 BAB dan 140 pasal. Berdasarkan Konstitusi 1998, dibentuklah Mahkamah Konstitusi yang mana ketua serta anggotanya dipilih oleh Presiden dengan persetujuan dari parlemen.

Situasi politik dibawah kepemimpinan bashir terjadi perebutan kekuasaan antara Bashir dengan Thurabi yaitu Ketua Parlemen Nasional Sudan. Puncaknya setelah dikeluarkan dekrit presiden tanggal 12 Desember 1999. Thurabi mengajukan rancangan amandemen terhadap konstitusi 1998, yaitu untuk menghidupkan kembali lembaga Perdana Menteri, ketentuan kedudukan wali didalam pasal 56, 57 dan 60. Pengajuan amandemen Thurabi dijawab oleh bashir dengan mengeluarkan dekrit yang berisikan pembubaran parlemen nasional, pemberlakuan keadaan darurat di Sudan selama 3 bulan, menanggihkan pasal 56, 57 dan 60 mengenai kedudukan para wali. Pada tanggal 24 Januari 2000, Bashir mengumumkan susunan kabinet yang baru menggantikan yang lama diantaranya Menteri Pertahanan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Penerangan dan Kebudayaan, Menteri Kehakiman. Bashir juga mengangkat 25 orang wali baru untuk 25 negara bagian di Sudan. Pada bulan Maret 2000, Bashir kembali mengumumkan perpanjangan keadaan darurat di Sudan sampai akhir tahun 2000. Mulai saat itu, Thurabi menjadi pihak oposisi bagi Bashir dimana kebijakan-kebijakan pemerintah yang dinilai Thurabi merugikan rakyat diprotes olehnya.

Pemerintahan Bashir menyelenggarakan pemilihan umum pada bulan Desember 2000 untuk memilih presiden serta anggota parlemen. Pemilu tersebut diikuti oleh Partai Kongres Nasional, PPP, dan Partai Serikat Buruh, dimana partai-partai politik oposisi tidak ikut karena memboikot pemilu. Hasil pemilu kembali dimenangkan oleh Partai Kongres Nasional sehingga Bashir terpilih menjadi Presiden Sudan selama periode 2001-2006.

4. Konflik Perebutan Wilayah Kota Dafur

Wilayah Darfur terdapat di sebelah barat Sudan, merupakan wilayah yang sangat luas dengan jumlah penduduk sekitar 1.7 juta jiwa. Wilayah Darfur dibagi menjadi tiga bagian yaitu, Darfur Utara dengan ibukota Al Fashir, Darfur Selatan dengan ibukota Nyala, dan Darfur Barat dengan ibukota Al jenina. Darfur terdapat dua kelompok yaitu kelompok Arab dengan kelompok non – Arab. Kelompok Arab yang disebut kelompok Baggara; terdiri dari suku Rizaigad, Mahariya, Irayqat, dan Habaniyah. Dan kelompok non – Arab disebut juga Afrika hitam yang terdiri dari suku Fur yang paling besar, Zaghawa (terbagi menjadi dua yaitu Zaghawa Tuer dan Zaghawa Kube), Massalit, Tunjur, Bergid, dan Berti.

Konflik dapat terjadi diantara etnik Arab atau afrika sehingga konflik pada fase tertentu tidak berdimensi etnik. Konflik tradisional kemudian semacam mengarah ke konflik antar etnik ketika pemerintahan Shadiq al Mahdi melatih dan mempersenjatai milisi “Murahiliin” dari etnik Baggara untuk menghadapi pemberontakan Sudan Selatan (SPLM/A) yang mencoba masuk Darfur. Kerja sama antara Khartoum dan Murahiliin ini berlanjut pada masa presiden Bashir.⁶

Di pihak lain, para milisi dari etik Fur, Zaghawa dan Massalit pada militer 2001 bergabung dalam satu gerakan. Mereka mendapat latihan militer dari kelompok Zaghawa yang sebelumnya telah mendapat latihan dari tentara Sudan dan Chad. Mereka mempersenjatai diri dengan senjata – senjata yang dibeli atau diselundupkan dari Chad dan Libya. Maka konflik antar milisi makin sering dan berskala lebih bear. Gerakan itu kemudian menamakan sebagai “*Front Pembebasan Darfur*” atau *Darfur Liberation Font (DLF)*. Sebulan setelah mereka melancarkan serangan ke Golo, Jabal Marra pada Febuari 2003 pimpinan gerakan menemui John Garang (Pemimpin SPLM/A) di Rumbek. Setelah pertemuan itu DLF diubah namanya menjadi SLM/A yang mengedepankan visi “Sudan

⁶ Adnan, Abdul Hadi. Dalam jurnal; *Penyelesaian Masalah Sudan dan Krisis di Darfur*. Hal. 2

Baru” yang pro persatuan, demokrasi, sekularisme dan persamaan antara semua warga negara. Meskipun hasil pertemuan itu tidak diumumkan, namun orang dapat mengasumsikan bahwa bahwa antara gerakan di Sudan Selatan dan gerakan di Darfur paling tidak penyamaan visi.

Krisis di Darfur pada dasarnya merupakan konflik internal Sudan namun berimbas ke negara tetangga, khususnya Chad. Krisis mencakup aspek militer, sosial-ekonomi dan etnis;

1. Antara 1968-1998 terjadi 29 konflik senjata dalam skala intensitas kecil, dengan perincian; tiga kali antara 1968-76, lima kali antara 1976-80 dan 21 kali antara 1980-98. Penyebab konflik terutama karena perebutan sumber daya alam yang menyangkut air dan lading perternakan/bercocok tanam. Konflik tersebut bisa terjadi antar suku maupun intersuku.
2. Pada bulan Februari 2003 dua kelompok pemberontak yang menamakan diri SLM/A dan JEM menyerang posisi – posisi militer Sudan dan pemerintahan wilayah Darfur. Dengan sendirinya Pemerintah Sudan balik menyerang kembali para pemberontak. sebenarnya banyak anggota pasukan Sudan yang ebrasal dari Darfur. Ketika Sudan Selatan memberontak, terbentuklah para milisi untuk memperkuat sistem keamanan setemoat. Mereka inilah yang merasa tidak puas terhadap perlakuan Khartoum.
3. Dimensi politik: para elit di Darfur bahwa dengan melakukan pemberontakan, kemungkinan mereka dapat menarik keuntungan politis, seperti yang juga dilakukan oleh SPLM/SPLA di Sudan Selatan. Karena itu dari segi timing, krisis di Darfur ini pecah tidak lama setelah tercapai penyelesaian masalah Sudan Selatan.
4. Aspek Sosial-ekonomi: kondisi sosial-ekonomi Darfur sungguh sangat menyedihkan. Kekeringan selama 30 tahun melanda daerah gurun pasir yang

dihuni 6 juta orang. padahal kebanyakan penduduk hidup dari pertanian dan peternakan. Tanpa konflik bersenjata mereka hidup dengan sengsara. Air merupakan komoditas langka, termasuk dikoa Al Fashir, Nyala dan Al Jennina. Sekecil apapun pergolakan bersenjata akan bertambah menyengsarakan penduduk Darfur.

5. Aspek Kesukuan/etnis: Konflik di antara sebagian dari suku 80 suku di Darfur yang hampir seluruhnya beragama Islam, tidak dapat dikategorikan *ethnic cleansing* karena dalam konflik Darfur ini yang terlibat bentrokan adalah sesama muslim. Bahkan konflik inter-etnik terjadi. Menjelang putaran terakhir perundingan di Abuja 2006, kelompok SLM bentrok dengan JEM agar jika ada penyelesaian politik maka kelompok pemberontak yang lebih menonjol akan memperoleh posisi yang lebih baik.

Mungkin bukan kebetulan bahwa krisis Darfur mencuat, tidak lama setelah pemerintah Sudan dan pemberontak Sudan People's Liberation Movement/Army di Sudan Selatan mencapai protocol Mashakos, 20 Juli 2002 yang diikuti oleh persetujuan pengaturan keamanan pada tanggal 25 September 2003 dan persetujuan pengaturan kekayaan pada tanggal 9 Januari 2004, keduanya di tandatangani di Naivasha, Kenya serta perdamaian Komprehensif pada 9 Januari 2005, yang ditandatangani Wapres Sudan dan pemimpin SPLM/A di Nairobi. Persetujuan yang mengakhiri pemberontakan selama 21 tahun itu antara lain memuat:⁷

1. Pembagian kekuasaan di Khartoum yang membuka kesempatan para pemuka Sudan Selatan menduduki jabatan tinggi, bukan saja sebagai Wakil Presiden Pertama Sudan tapi juga beberapa menteri di kabinet.

⁷ Adnan, Abdul Hadi. Dalam jurnal; *Penyelesaian Masalah Sudan dan Krisis di Darfur*. Hal.3

2. Ditentukannya masa transisi enam tahun bagi Sudan Selatan sebagai persiapan referendum yang akan menentukan apakah Sudan Selatan akan tetap besatu atau ingin berpisah dari Sudan.
3. Ditentukan pembagian kekayaan alam, khususnya minyak mentah masing – masing 50 persen.

Pada dasarnya masalah Sudan Selatan dan Darfur merupakan konflik internal, namun berdampak pada negara-negara tetangga Sudan. karena itu wajar jika dalam upaya penyelesaian kedua masalah melibatkan organisasi regional terkait; dalam masalah Sudan Selatan yang aktif adalah IGAD (Inter-Governmental Authority on Development), yang bernggotakan tujuh negara Afrika Timur, sednagkan krisis di Darfur ditengahi oleh Uni Afrika.

Perkembangan positif lain terjadi di Sudan dengan ditandatanganinya persetujuan Rekonsiliasi Damai antara pemerintah Sudan dan kelompok oposisi *National Democratic Alliance (NDA)*, suatu gabungan 25 partai dan organisasi politik pada 18 Juni 2005 di Cairo yang di tandatangani oleh Wapres Ali Osman Mohamed Taha dan Muhammad Osman Mirghani, yang disaksikan oleh Presiden sudan, Presiden Mesir dan Ketua SPLM/A. Selanjutnya Konstitusi Baru Sudan diberlakukan 9 Juli 2005, disusul pelantikan (kembali) Presiden Omar Hassan Ahmed el Bashir pada 10 Juli 2005 diikuti colonel Dr. Jhon Garang, yang dilantik menjadi Wapres I yang sebelumnya di jabat oleh Ali Osman Mohamed Taha yang digeser menjadi Wapres II. Hanya 22 hari setelah dilantik John Garang tewas dalam kecelakaan helicopter kepresidenan Uganda pada tanggal 1 Agustus 2005. Posisinya digantikan oleh Salva Kiir Mayardit, tokoh kedua dari SPLM/A.

Selain itu para tokoh Sudan Selatan juga menduduki beberapa jabatan di cabinet, termasuk Dr. Lam Akol sebagai Menlu. Bukan hanya itu, Pemerintah Sudan pada akhir April 2006 menawarkan kepada 16 tokoh Sudan Selatan untuk dijadikan duta besar Sudan di

beberapa negara. Langkah menarik hati kalangan berpengaruh dari Sudan Selatan, di satu segi dapat meredakan sementara tuntutan untuk pemisahan diri Sudan Selatan dalam referendum mendatang.

B. Konflik Perebutan Wilayah Abyei



Ketegangan antara Sudan Utara dengan Sudan Selatan sudah sangat memanas dan menimbulkan konflik yang sangat hebat terkait adanya sejumlah persolan berupa perbatasan akan penguasaan minyak di jalur kedua negara tersebut. Sudan Selatan yang merupakan pecahan dari Sudan membentuk pemberontak yang diberi nama Gerakan Pembebasan rakyat Sudan. Presiden Sudan Utara yang bernama Al-Bashir. Bashir mengatakan bahwa para pemberontak tersebut harus segera dimusnahkan agar wilayah tersebut aman dan stabil.

Pertikaian antara kedua negara ini, telah meluas sampai ke berbagai negara. Dan banyak yang khawatir, kedua negara ini akan segera berperang bila pertikaian atau akar dari segala masalah tersebut. Pertempuran ini terjadi akibat adanya perebutan wilayah minyak di Abyei oleh Sudan Selatan dan pertempuran terjadi selama delapan hari. Akan tetapi, Sudan Selatan

membutuhkan dua jalur pipa yang melewati wilayah Sudan sebagai satu-satunya sarana menyalurkan minyaknya ke pelabuhan ekspor di Laut Merah. Sudan menuduh Sudan Selatan tak mau membayar ongkos sewa jalur pipa minyak ini. Sebaliknya, Sudan Selatan menuduh Sudan mencuri minyaknya yang dialirkan melalui pipa itu⁸. Pertempuran kembali terjadi di wilayah Aweil, Sudan Selatan, sekitar 160 km sebelah barat Abyei.

Namun Sudan Selatan itu tidak pernah mengklaim wilayah Abyei merupakan wilayah mereka. Oleh sebab itu, wilayah Abyei yang kaya akan minyak masih merupakan wilayah Sudan Utara. Adanya kecaman dari Al-Bashir selaku presiden Sudan Utara bahwa gerakan pemberontak merupakan awal dari pertikaian yang sebelumnya tentara Sudan tersebut tewas sebanyak 22 orang. Sebelumnya ladang minyak Abyei diakui dunia internasional sebagai wilayah Sudan, namun belakangan menjadi perdebatan setelah Sudan Selatan berdiri, karena batas wilayah kedua negara di sekitar ladang minyak itu masih belum terlalu jelas. Wartawan yang meliput pidato tersebut dan mengomentari bahwa gerakan pemberontak tersebut sudah seperti penyakit dan penyakit tersebut harus dihancurkan sampai keakar-akarnya agar mereka tidak bisa membuat kekacauan lagi. Pidato presiden tersebut merupakan sebuah deklarasi perang terhadap Sudan Selatan⁹. Dan kubu Sudan Utara sudah siap melancarkan serangan kepada Sudan Selatan tersebut.

C. United Interim Security for Abyei (UNISFA)

Menurut ketentuan resolusi Dewan Keamanan 1990 PDF Document (2011) 27 Juni 2011, UNISFA akan memantau dan memverifikasi pemindahan Sudan Angkatan Bersenjata, Tentara setiap Pembebasan Rakyat Sudan (SPLM) atau penggantinya dari daerah Abyei; "Selanjutnya, daerah Abyei harus demiliterisasi dari setiap angkatan selain UNISFA dan

⁸ Harian Kompas. <http://internasional.kompas.com/read/2012/02/29/02521135/Konflik.Sudan.Makin.Panas>. diambil pada tanggal 12 Desember 2016.

⁹BBC indonesiaofficial. http://www.bbc.co.uk/indonesia/dunia/2012/04/120419_sudanwar.shtml. diambil pada tanggal 12 Desember 2016

Abyei Kepolisian," tambahnya. Resolusi itu juga dikenakan kekuatan interim dengan memfasilitasi pengiriman bantuan kemanusiaan dan pergerakan bebas pekerja bantuan di dan sekitar Abyei. Bila perlu, dan berkoordinasi dengan Abyei Kepolisian, pasukan UNISFA juga akan memberikan keamanan bagi infrastruktur minyak di kawasan itu.

Bertindak di bawah Bab VII dari Piagam PBB, Dewan juga berwenang UNISFA, sesuai kemampuannya dan daerah penyebaran, untuk mengambil tindakan yang diperlukan untuk melindungi personil PBB, fasilitas, instalasi, dan peralatan; menjamin keamanan dan kebebasan bergerak personil PBB, pekerja bantuan dan anggota Komite Pengamat Militer Bersama dan Joint Military Observer Tim; dan, tanpa mengurangi tanggung jawab dari pihak berwenang yang relevan, "untuk melindungi warga sipil di daerah Abyei di bawah ancaman kekerasan fisik". Hal ini juga resmi penggunaan kekuatan untuk melindungi daerah "dari serangan oleh unsur-unsur yang tidak sah", sebagaimana didefinisikan dalam perjanjian antara para pihak.

Resolusi itu juga meminta Sekretaris Jenderal untuk "memastikan bahwa pemantauan hak asasi manusia yang efektif dilakukan" dan hasilnya dimasukkan dalam laporan kepada Dewan, dalam 30 hari ke depan, dan setiap 60 hari sesudahnya. Pada tanggal 14 Desember 2011, mengakui kebutuhan mendesak untuk Sudan dan Sudan Selatan untuk memulai proses normalisasi perbatasan, Dewan Keamanan, dengan resolusi 2024 (2011), memutuskan untuk memperluas mandat UNISFA untuk mencakup bantuan dalam proses tersebut, termasuk mendukung pengembangan mekanisme manajemen bilateral yang efektif, memfasilitasi penghubung dan membangun rasa saling percaya.

Dewan mendesak Sudan dan Sudan Selatan untuk melaksanakan sepenuhnya komitmen mereka berdasarkan perjanjian tanggal 29 Juni 2011, yang bersangkutan penciptaan zona perbatasan demiliterisasi aman, dan 30 Juli 2011, berurusan dengan pembentukan Joint Border Verifikasi dan Pengawasan Mekanisme, dan mendesak mereka

untuk bekerja sama sepenuhnya dengan satu sama lain dan memberikan dukungan penuh untuk UNISFA.

Pada tanggal 29 Mei 2013, Dewan Keamanan, dengan resolusi 2104, meningkatkan kekuatan militer resmi dari Angkatan dan memutuskan bahwa dukungan untuk kegiatan operasional Verifikasi Perbatasan Bersama dan Mekanisme Pemantauan akan mencakup dukungan kepada Komite Ad Hoc.